

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Peningkatan Pengetahuan dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R di Kota Pekalongan

Peningkatan pengetahuan merupakan strategi penting dalam pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh DLH Kota Pekalongan melalui berbagai program edukasi. Upaya ini meliputi forum diskusi, sosialisasi, pelatihan, media massa, pameran kerajinan daur ulang, sekolah Adiwiyata, serta pembinaan bank sampah dan TPS3R, dengan menempatkan peningkatan pengetahuan sebagai dasar untuk mendorong sikap dan praktik pengelolaan sampah 3R. Upaya ini telah berhasil menumbuhkan pemberdayaan pada sebagian masyarakat dengan mendorong pemahaman tentang konsep pengelolaan sampah yang kemudian mulai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Keberhasilan program tercermin dari berbagai praktik positif, seperti partisipasi aktif dalam bank sampah, pemanfaatan TPS3R, serta kreativitas dalam kegiatan daur ulang.

Meskipun demikian, peningkatan pengetahuan tersebut tidak langsung menghasilkan perubahan sikap dan praktik. Masih terdapat kelompok masyarakat yang enggan memilah sampah karena menganggap pengelolaan sampah sepenuhnya tanggung jawab pemerintah atau merasa kesulitan meninggalkan kebiasaan lama. Selain itu, sebagian masyarakat

belum tersentuh program edukasi sehingga pengetahuannya masih terbatas. Dengan demikian, program DLH telah berhasil menumbuhkan pengetahuan dan motivasi walaupun pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan masih belum optimal sehingga diperlukan strategi lanjutan agar pengetahuan dapat benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata.

2. Hambatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Peningkatan Pengetahuan dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R di Kota Pekalongan

Rendahnya pengetahuan masyarakat Kota Pekalongan dalam pengelolaan sampah disebabkan oleh hambatan internal maupun eksternal. Hambatan internal pada DLH mencakup keterbatasan jumlah SDM, minimnya anggaran, waktu yang terbatas untuk menjangkau seluruh wilayah, serta pemanfaatan media sosial yang belum optimal yang padahal berpotensi menjangkau masyarakat luas dengan biaya rendah. Keterbatasan tersebut membuat program edukasi tidak dapat dilakukan secara intensif, berkesinambungan, dan merata.

Sementara itu, hambatan eksternal berasal dari masyarakat, seperti rendahnya partisipasi, kesibukan warga, sulitnya mengubah pola pikir terutama pada kelompok usia lanjut, rendahnya tingkat pendidikan, sikap apatis, serta budaya ketergantungan pada petugas kebersihan. Hambatan ini diperparah oleh keterbatasan sarana, seperti TPS3R, bank sampah, dan tempat sampah terpilah, serta lemahnya regulasi dan penegakan sanksi

sehingga masyarakat tidak memiliki dorongan yang kuat untuk konsisten menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh.

Kondisi tersebut menyebabkan pengetahuan yang ditanamkan tidak selalu terwujud dalam praktik nyata. Meskipun DLH berhasil meningkatkan pemahaman dan membangun sikap positif pada sebagian masyarakat, praktik berkelanjutan tetap sulit tercapai karena minimnya dukungan fasilitas, regulasi, dan tindak lanjut. Dengan demikian, hambatan terbesar pemberdayaan masyarakat terletak pada keterbatasan sistem pendukung, bukan pada ketiadaan program edukasi. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian, penerimaan, dan keberlanjutan edukasi perlu diperkuat agar pengetahuan benar-benar dapat bertransformasi menjadi sikap dan praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

5.2.Saran

Berikut adalah saran-saran strategis dengan tujuan agar upaya pemberdayaan masyarakat oleh DLH Kota Pekalongan dapat berjalan lebih efektif, merata, dan berkelanjutan.

1. Program pemberdayaan yang dijalankan DLH Kota Pekalongan masih belum optimal sehingga perlu ditingkatkan agar mampu mendorong peningkatan pengetahuan sekaligus perubahan sikap dan praktik masyarakat. Upaya penguatan dapat dilakukan dengan mengoptimalkan program edukasi dengan cara:
 - a. Masih terdapat kelompok masyarakat yang belum tersentuh program edukasi sehingga pengetahuan tentang pengelolaan sampah rendah.

DLH perlu meningkatkan intensitas sosialisasi, pelatihan, dan forum diskusi secara berkala di setiap kelurahan, termasuk wilayah yang jarang dijangkau agar cakupan masyarakat lebih luas.

- b. Motivasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah. Padahal, banyak warga rutin mengikuti kegiatan komunitas seperti PKK atau majelis taklim. Oleh karena itu, DLH disarankan memperbanyak inovasi edukasi dengan mengaitkan pengelolaan sampah pada nilai agama atau sosial setempat sehingga motivasi non ekonomi dapat meningkat dan partisipasi semakin meluas.
- c. pengetahuan yang diperoleh masyarakat belum selalu diterapkan dalam praktik. DLH dapat menyediakan tindak lanjut dan monitoring melalui kunjungan rutin ke komunitas, sekolah, dan rumah tangga agar penerapan pemilahan dapat dipantau, diberi umpan balik, serta memperkuat sikap positif masyarakat yang sudah terbentuk.

2. Dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan yang bersumber dari internal dan eksternal di lapangan maka perlu meminimalisir hambatan tersebut dengan cara:

a. Hambatan Internal

Pertama, keterbatasan jumlah petugas membuat edukasi tidak berjalan intensif, sehingga DLH perlu meningkatkan kapasitas melalui pelatihan bagi petugas yang ada serta merekrut kader lingkungan atau tenaga sukarela di setiap kelurahan agar program lebih luas, intensif, dan berkelanjutan. Kedua, pemanfaatan media

sosial masih belum maksimal, sehingga DLH perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk kampanye digital, pembuatan konten edukatif, dan penggunaan media interaktif. Contohnya, membuat video tutorial pemilahan sampah residu untuk menjangkau kelompok usia produktif yang sibuk secara efektif dengan biaya rendah

b. Hambatan Eksternal

Pertama, rendahnya partisipasi warga dalam kegiatan edukasi karena kesibukan, motivasi yang rendah, atau anggapan bahwa sampah sepenuhnya tanggung jawab pemerintah dapat diatasi dengan menjadwalkan kegiatan lebih fleksibel, melibatkan masyarakat secara partisipatif, serta menggandeng tokoh masyarakat, sekolah, dan influencer lokal agar pesan edukasi lebih luas dan menarik. Kedua, keterbatasan sarana seperti TPS3R, bank sampah, dan wadah terpilah menghambat penerapan pengetahuan sehingga DLH bersama kelurahan perlu menambah fasilitas yang mudah dijangkau serta menggandeng swasta atau organisasi non-profit untuk mendukung penyediaan dan operasional. Ketiga, lemahnya regulasi dan sanksi membuat masyarakat kurang terdorong sehingga perlu penguatan aturan, sosialisasi sanksi, dan pengawasan rutin agar masyarakat patuh serta konsisten dalam praktik pengelolaan sampah.